

# JURNAL PERTANAHAN

Perkembangan Penggunaan Tanah Kota Satelit dalam Mendukung DKI Jakarta  
Septina Marryanti

Penataan Pertanahan di Wilayah Perbatasan Darat Negara  
(Sinkronisasi dan Koordinasi Lintas Kementerian dan Lembaga dalam Percepatan Pembangunan)  
Arditya Wicaksono

Penggunaan Continuously Operating Reference System (CORS) di Bidang Pertanahan  
Indriyati dan Romi Nugroho

Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan Sertipikasi Tanah di Daerah Perkotaan  
Muhammad Mauludy

Reformasi Pengelolaan Tanah di Sekitar Kawasan Hutan  
Nanang Subandi

Penerapan Teknologi Dalam Analisis Perubahan Penggunaan Tanah Terhadap  
Rencana Umum Tata Ruang Kota Kec Mertoyudan  
Taufiq Effendi Sinaga

Tantangan Administrasi Pertanahan Era Otonomi Daerah Dinamika Desentralisasi Pusat dan Daerah  
Agus Kuncoro

# JURNAL PERTANAHAN

ISSN 0853-1676

Vol. 4

No. 2

November 2014

Penanggung Jawab

**Drs. Suhaily Syam, M.M**

Redaktur

**Ir. Iwan Taruna Isa, MURP**

**Ir. Eliana Sidipurwanti, M.Si**

Mitra Bestari

**Prof. Dr. Endriatmo Soetarto, MA**  
Pakar Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor

**Prof. Dr. Ir. Budi Mulyanto, M.Sc**  
Pakar Ilmu Tanah Institut Pertanian Bogor

**Dr. Satyawan Sunito**  
Pakar Agraria Institut Pertanian Bogor

**Noer Fauzi Rachman**  
Pemerhati Agraria

Penyunting Pelaksana

**Dr. Aslan Noor, SH.,MH.,SPI**  
Pakar Ilmu Hukum Tata Negara

**Gatot Teja Pratama, A.Ptnh., M.M**  
Manajemen Pertanahan

**Indriyati, S.SiT**  
Peneliti Bidang Pertanahan

**Arif Ramasiwi G.P., SH**  
Hukum di Bidang Pertanahan

Desain Grafis & Fotografer

**Riska Aidina Pristiria, S.T**

**Shofiatul Munawaroh, S.Kom**

Sekretariat

**Munsyarief, A.Ptnh., M.Si**

**Supriyadi, S.Sos**

**Yudha Purbawa, S.P**

**Melia Yusri, S.P**

**Romi Nugroho, S.P**

## PENGANTAR REDAKSI

Selamat bertemu kembali dengan jurnal pertanahan Volume 4 Nomor 2 Tahun 2014, dan kami tampil dengan mengusung tema yang beragam dan latar belakang penulis yang semakin berwarna namun tetap tidak mengurangi substansi pertanahan, latar belakang dan disiplin ilmu yang berbeda merupakan pisau analisis guna menciptakan ide-ide baru guna memperkaya kajian di bidang iptek pertanahan. Berikut kami uraikan berbagai penulis yang terbit dalam edisi ini:

Septina Marryanti menulis artikel mengenai Peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan beban yang berat bagi wilayah sehingga daya dukung lingkungan semakin berkurang. Beban yang terlalu berat menjadikan Jakarta memerlukan kota-kota kecil di sekitarnya untuk menopang kebutuhan hidup penduduk Jakarta. Muncullah Kota Satelit Bogor, Depok, Bekasi dan Tangerang sebagai lapis pertama.

yang merupakan daerah penyangga Kota Megapolitan Jakarta. Wilayah kemudian berkembang ke arah kota satelit yang berfungsi sebagai pengendali urbanisasi dan kepadatan Kota Jakarta. Tinjauan spasial ini menggunakan Analisis shift share untuk mengetahui kinerja perkonomian wilayah.

Arditya Wicaksono menulis artikel mengenai Wilayah khusus perbatasan memiliki arti yang sangat strategis terhadap suatu kedaulatan Indonesia. Perbatasan darat memiliki arti yang sama penting dengan perbatasan laut. Masing-masing wilayah perbatasan darat ini mempunyai karakteristik yang spesifik dari segi Pertanahan. Memerlukan perhatian dan penanganan yang juga bersifat khusus dari Pemerintah, termasuk Badan Pertanahan Nasional memiliki Instrumen Pemilikan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penguasaan Tanah (P4T) merupakan dasar bagi Badan Pertanahan Nasional untuk melaksanakan program strategis di wilayah perbatasan darat negara. Upaya ini terkendala tata ruang, batas kawasan hutan, dan batas Negara yang belum terselesaikan. Kebijakan penataan pertanahan di perbatasan memerlukan koordinasi antar lembaga pemerintah supaya tercipta kebijakan yang berdampak problem solving bagi keterbatasan masyarakat lokal.

Indriyati dan Romi Nugroho menulis artikel mengenai Penggunaan *Continuously Operating Reference Station* (CORS) dapat mempercepat secara teknis capaian pengukuran dalam mendukung pelayanan pertanahan. Sulit mewajibkan seluruh kegiatan BPN kantah yang berhubungan dengan pengukuran untuk menggunakan CORS karena jumlah alat masih terbatas dan terdapat kendala teknis yang dialami petugas saat lapangan, kendala komunikasi data (rover-base station-server) dan tidak adanya penganggaran serta rencana pemeliharaan alat.

Muhammad Mauludy menulis artikel mengenai Manfaat yang ditimbulkan dari keberadaan sertipikat tanah merupakan faktor pendorong masyarakat untuk mensertipikatkan tanahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa sejauhmana penggunaan sertipikat tanah sebagai jaminan kredit, nilai tanah, biaya perolehan sertipikat tanah dan tingkat pendapatan mempengaruhi permintaan sertipikasi tanah di daerah perkotaan. Menggunakan analisis ekonometrika dengan metode regresi Pooled Least Square (PLS) terhadap 22 kota besar pada tahun 2010 dan 2011. Membukan sertipikat tanah memiliki nilai ekonomi dimana nilai tanah, dan tingkat pendapatan berpengaruh positif hal ini membuat permintaan sertipikasi tanah menjadi naik disisi lain, sedangkan biaya untuk memperoleh sertipikat tanah berpengaruh negatif terhadap permintaan sertipikasi tanah.

Nanang Subandi menulis artikel mengenai Konflik dapat muncul ke permukaan akibat ketidakpastian status hak masyarakat di kawasan hutan dan ketidakjelasan tata batas kawasan hutan. Perlu adanya mekanisme penyelesaian konflik dan integrasi kebijakan yang dapat menjadi pegangan seluruh pihak untuk menyelesaikan yang komprehensif dan tidak melanggar Hukum.

Taufiq Effendi Sinaga menulis artikel mengenai Perkembangan infrastruktur baru dan laju pertumbuhan penduduk yang pesat di Kota meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya tanah serta mendorong terus berlangsungnya perubahan penggunaan tanah atau lahan sebagai bagian dari pemanfaatan ruang. Kondisi seperti ini akan terus terjadi mengingat ketersediaan tanah yang sangat terbatas dan semakin sempit, walaupun RUTRK sebagai pedoman pengarah dan pengendalian bagi pelaksanaan pembangunan kota telah ada. Tulisan yang merupakan intisari dari tesis ini mencoba menganalisis perubahan penggunaan tanah, terutama tentang bentuk dan arah gerak perubahan yang terjadi, kesesuaian dengan RUTRK dan penyebab perubahan, serta penggunaan model regresi dengan pendekatan linear dalam memprediksi perubahan luas total penggunaan tanah persawahan dan perumahan. Menggunakan teknik *overlay* antara Peta Penggunaan Tanah secara *time series* dengan Peta Rencana Pemanfaatan Ruang RUTRK.

sertipikat tanah sebagai jaminan kredit, nilai tanah, biaya perolehan sertipikat tanah dan tingkat pendapatan mempengaruhi permintaan sertipikasi tanah di daerah perkotaan. Penelitian ini menggunakan analisis ekonometrika dengan metode regresi Pooled Least Square (PLS) terhadap 22 kota besar pada tahun 2010 dan 2011. Hasil penelitian membuktikan bahwa penggunaan sertipikat tanah sebagai jaminan kredit, nilai tanah, dan tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap permintaan sertipikasi tanah, sedangkan biaya perolehan sertipikat tanah berpengaruh negatif terhadap permintaan sertipikasi tanah.

**Kata kunci :** Akses Kredit, Nilai Tanah, Permintaan Sertipikat Tanah

**Nanang Subandi (Pemerhati Agraria, Jawa Timur)**  
**REFORMASI PENGELOLAAN TANAH DI SEKITAR KAWASAN HUTAN**

*Jurnal Pertanahan, Volume 4, Nomor 2, November 2014, Halaman : 77 - 91*

**ABSTRAK**

Konflik dapat muncul ke permukaan akibat ketidakpastian status hak masyarakat di kawasan hutan dan ketidakjelasan tata batas kawasan hutan. Perlu adanya mekanisme penyelesaian konflik dan integrasi kebijakan yang dapat menjadi pegangan seluruh pihak untuk menyelesaikan yang komprehensif dan tidak melanggar Hukum.

**Kata kunci :** Klaim Atas Hak dan Integrasi

**Taufiq Effendi Sinaga (Kanwil. BPN Prov. Sumatera Utara Medan)**  
**PENERAPAN TEKNOLOGI DALAM ANALISIS PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH TERHADAP RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA KEC MERTOYUDAN**

*Jurnal Pertanahan, Volume 4, Nomor 2, November 2014, Halaman : 93 - 106*

**ABSTRAK**

Perkembangan infrastruktur baru dan laju pertumbuhan penduduk yang pesat di Kota meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya tanah serta mendorong terus berlangsungnya perubahan penggunaan tanah atau lahan sebagai bagian dari pemanfaatan ruang. Kondisi seperti ini akan terus terjadi mengingat ketersediaan tanah yang sangat terbatas dan semakin sempit, walaupun RUTRK sebagai pedoman pengarah dan pengendalian bagi pelaksanaan pembangunan kota telah ada. Tulisan yang merupakan intisari dari tesis ini mencoba menganalisis perubahan penggunaan tanah, terutama tentang bentuk dan arah gerak perubahan yang terjadi, kesesuaian dengan RUTRK dan penyebab perubahan, serta penggunaan model regresi dengan pendekatan linear dalam memprediksi perubahan luas total penggunaan tanah persawahan dan perumahan. Menggunakan teknik *overlay* antara Peta Penggunaan Tanah secara *time series* dengan Peta Rencana Pemanfaatan Ruang RUTRK.

**Kata kunci :** Perubahan Penggunaan Tanah, RUTRK

**Agus Kuncoro (Pemerhati Agraria, Jawa Timur)**  
**TANTANGAN ADMINISTRASI PERTANAHAN ERA OTONOMI DAERAH DINAMIKA DESENTRALISASI PUSAT DAN DAERAH**

*Jurnal Pertanahan, Volume 4, Nomor 2, November 2014, Halaman : 107 - 120*

**ABSTRAK**

Administrasi Negara adalah seni mengolah Negara yang memiliki karakter yang beragam. Pengelolaan pertanahan hendaknya dilakukan sinergi antara pusat dan daerah dan tidak terpengaruh oleh isu-isu desentralisasi sebab tanah adalah perkar sebuah bangsa dan memandang tanah tidak dengan batas-batas kewenangan tetapi lebih kearah univikasi bahwa Negara menganggap persoalan tanah adalah persoalan kedaulatan. Hendaknya pembentukan lembaga dan pengelolaan pertanahan harus bersifat kokoh dan multidimensi.

**Kata kunci :** Administrasi Negara, Desentralisasi dan Pertanahan

## DAFTAR ISI

1. Perkembangan Penggunaan Tanah Kota Satelit dalam Mendukung DKI Jakarta ..... 1 - 22  
*Septina Marryanti*
2. Penataan Pertanahan di Wilayah Perbatasan Darat Negara (Sinkronisasi dan Koordinasi Lintas Kementerian dan Lembaga dalam Percepatan Pembangunan) ..... 23 - 34  
*Arditya Wicaksono*
3. Penggunaan *Continuously Operating Reference System (CORS)* di Bidang Pertanahan ..... 35 - 52  
*Indriyati dan Romi Nugroho*
4. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Permintaan Sertifikasi Tanah di Daerah Perkotaan ..... 53 - 76  
*Muhammad Mauludy*
5. Reformasi Pengelolaan Tanah di Sekitar Kawasan Hutan ..... 77 - 91  
*Nanang Subandi*
6. Penerapan Teknologi dalam Analisis Perubahan Penggunaan Tanah Terhadap Rencana Umum Tata Ruang Kota Kec Mertoyudan ..... 93 - 106  
*Taufiq Effendi Sinaga*
7. Tantangan Administrasi Pertanahan Era Otonomi Daerah Dinamika Desentralisasi Pusat dan Daerah ..... 107 - 120  
*Agus Kuncoro*

Agus Kuncoro menulis artikel mengenai Administrasi Negara dipandang sebagai sebuah seni mengolah Negara yang memiliki karakter yang beragam. Pengelolaan pertanahan hendaknya dilakukan sinergi antara pusat dan daerah dan tidak terpengaruh oleh isu-isu desentralisasi sebab tanah adalah perkat sebuah bangsa dan memandang tanah tidak dengan batas-batas kewenangan tetapi lebih kearah univikasi bahwa Negara menganggap persoalan tanah adalah persoalan kedaulatan. Hendaknya pembentukan lembaga dan pengelolaan pertanahan harus bersifat kokoh dan multidimensi.

Redaksi

Septina Marryanti (Research and Development Center, National Land Agency Republic of Indonesia, Jakarta)

## SATELLITE CITY LAND USE DEVELOPMENT SUPPORT IN JAKARTA

Journal Pertanahan, Volume 4, No. 2, November 2014, Page : 1 - 22

### ABSTRACT

The increase in population resulted in a heavy burden on the environmental carrying capacity of the region to be on the wane. Load is too heavy to make Jakarta require small towns around it to sustain the needs of the population living in Jakarta. Came the Satellite City of Bogor, Depok, Bekasi and Tangerang as the first layer which is a buffer zone megapolitan city of Jakarta. Area then developed to the satellite town which serves as the controller of urbanization and density of the city of Jakarta. Overview The use of spatial shift share analysis to determine the performance perkonomanianregion. Furthermore, analysis of Location Quotient (LQ) is used to provide information about the economic sectors base of a region compared to other regions.

**Keywords :** Jakarta, Shift share, Location Quotient, Regional Methods

Arditya Wicaksono (Research and Development Center, National Land Agency Republic of Indonesia, Jakarta)  
**STRUCTURING LAND IN BORDER REGION STATE ARMY ( SYNCHRONIZATION AND COORDINATION CROSS MINISTRIES AND INSTITUTIONS IN DEVELOPMENT ACCELERATION )**

Journal Pertanahan, Volume 4, No. 2, November 2014, Page : 23 - 34

### ABSTRACT

The border region has a very strategic to an Indonesian sovereignty. Portas has the same meaning important to the sea border. Each region has a land border specific characteristics in terms of the Land. This condition requires attention and special handling is also of the Government, including the National Land Agency has the task of carrying out government duties in the land sector in national, regional and sectoral. Instruments Ownership, Usage, Waste, Land Tenure (P4T) is the foundation like the National Land Agency to implement strategic programs in the land borders of the country. Efforts have been constrained spatial, forest boundaries and national borders unresolved. Land in the border structuring issues require coordination among government agencies in order to create policies that impact problem solving for the limitations of the local community. The case study method to explain the problems at the end of the state border.

**Keywords :** The border region, Land Arrangement, Inter-Agency Coordination

Indriayati dan Romi Nugroho (Research and Development Center, National Land Agency Republic of Indonesia, Jakarta)

## CONTINUOUSLY OPERATING USE REFERENCE SYSTEM ( CORS ) IN THE LAND

Journal Pertanahan, Volume 4, No. 2, November 2014, Page : 35 - 52

### ABSTRACT

The aim of this study was to determine the implementation of utilization and use of Continuously Operating Reference Station (CORS), especially the technical conditions of use and performance measurement in support of land services. Technical use is an implementation of the field, both in the Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional and Kantor Pertanahan, while their achievements are the result of the use and utilization of the tools acquired over the years. The method used is descriptive qualitative approach that emphasizes the use of CORS, as seen from the technical aspects and achievements of use CORS in support of land registration. From the research that has been carried out, the office is known that there are samples that have not been using CORS, although already have these tools, it is difficult requiring all activities related to the measurement to use CORS because the number of tools are limited and there are technical constraints experienced by officers when field, constraints data communication (rover-base station-server) and the absence of budgeting and planning tool maintenance. The use of a tool for the legalization of assets sporadic and non-sporadic and there is a correlation between educational background leaders for the policy of CORS and productivity use.

**Keywords :** CORS, Legalization Of Assets, Land

Muhammad Mauludy (Bureau of Planning and Cooperation, National Land Agency Republic of Indonesia, Jakarta)

## ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING DEMAND LAND CERTIFICATION IN URBAN AREAS

Journal Pertanahan, Volume 4, No. 2, November 2014, Page : 53 - 76

### ABSTRACT

The positive impact from land certification really a motivating factors for people to certifying their land. This study aims to identify and analyze the extent of the use of certificates of land as loan collateral, land value, cost of land certificate and income levels affect the demand for land certification in urban area. This study uses econometric analysis with regression methods Pooled Least Square (PLS) to 22 major cities in 2010 and 2011. The results proved that the use

# JURNAL PERTANAHAN

ISSN 0853-1676

Vol. 4

No. 2

November 2014

of certificates of land as loan collateral, land value, and the level of income has a positive effect on demand for land certification, while the cost of land certificate negatively affect the demand for land certification. This is a consequence of the absence of interaction among community members and local participation.

**Keywords :** Credit Access, Land Value, Demand Of Land Certificate

**Nanang Subandi (Agrarian Observer, Jawa Timur)**  
**REFORM OF LAND MANAGEMENT IN FOREST AREA AROUND**

**Journal Pertanahan, Volume 4, No. 2, November 2014, Page : 77 - 91**

## **ABSTRACT**

Conflicts may arise to the surface due to the uncertainty of the status of rights in forest areas and forest boundaries unclear. There needs to be a mechanism for conflict resolution and integration of policies that can be hold all parties to finalize a comprehensive and does not violate the law.

**Keywords :** Claims on the right and Integration Policy

**Taufiq Effendi Sinaga (BPN Regional Office of North Sumatra Province, Medan)**  
**APPLICATION OF TECHNOLOGY IN THE ANALYSIS OF LAND USE CHANGE TO THE GENERAL SPATIAL PLAN DISTRICT CITY MERTOYUDAN**

**Journal Pertanahan, Volume 4, No. 2, November 2014, Page : 93 - 106**

## **ABSTRACT**

The development of new infrastructure and rapid population growth rate in the City of improving the utilization and management of land resources and to encourage the continuing changes in land use or land as part of the utilization of space. These conditions will continue to occur given the very limited availability of land and more narrow, although RUTRK as a guide for the direction and control of the implementation of urban development have been there. Posts that are the essence of this thesis try to analyze changes in land use, particularly on the shape and direction of motion changes, compliance with RUTRK and causes of change, and the use of a regression model with a linear approach in predicting changes in the total area of agricultural land use and housing. Use traditional techniques Overlay Land Use Map in the time series with the Land Use Plan Map RUTRK

**Keywords :** Land Use Change, RUTRK

**Agus Kuncoro (Agrarian Observer, Jawa Timur)**  
**CHALLENGES OF LAND ADMINISTRATION REGIONAL AUTONOMY DYNAMICS OF DECENTRALIZATION AND REGIONAL CENTERS**

**Journal Pertanahan, Volume 4, No. 2, November 2014, Page : 107 - 120**

## **ABSTRACT**

Administration of the State is the state of art process that has kharakter diverse. Land management should be synergy between central and local and not affected by the issues of decentralization because the soil is perkat a nation and not looking at the ground with authority boundaries but more towards univikasi that the State considers the issue of land is a matter of sovereignty. Should be the establishment of institutions and land management should be sturdy and multidimensional.

**Keywords :** State Administration, Decentralization and Land



Septina Marryanti (Pusat Penelitian dan Pengembangan BPN RI, Jakarta)  
**PERKEMBANGAN PENGGUNAAN TANAH KOTA SATELIT DALAM MENDUKUNG DKI JAKARTA**

*Jurnal Pertanahan, Volume 4, Nomor 2, November 2014, Halaman : 1 - 22*

#### ABSTRAK

Peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan beban yang berat bagi wilayah sehingga daya dukung lingkungan semakin berkurang. Beban yang terlalu berat menjadikan Jakarta memerlukan kota-kota kecil di sekitarnya untuk menopang kebutuhan hidup penduduk Jakarta. Muncullah Kota Satelit Bogor, Depok, Bekasi dan Tangerang sebagai lapis pertama yang merupakan daerah penyangga Kota Megapolitan Jakarta. Wilayah kemudian berkembang ke arah kota satelit yang berfungsi sebagai pengendali urbanisasi dan kepadatan Kota Jakarta. Tinjauan spasial ini menggunakan Analisis *shift share* untuk mengetahui kinerja perkonomian wilayah. Lebih lanjut, analisis *Location Quotient* (LQ) digunakan untuk memberikan informasi mengenai sector ekonomi basis suatu wilayah di bandingkan dengan wilayah lainnya.

**Kata kunci :**

Arditya Wicaksono (Pusat Penelitian dan Pengembangan BPN RI, Jakarta)  
**PENATAAN PERTANAHAN DI WILAYAH PERBATASAN DARAT NEGARA (SINKRONISASI DAN KOORDINASI LINTAS KEMENTERIAN DAN LEMBAGA DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN)**

*Jurnal Pertanahan, Volume 4, Nomor 2, November 2014, Halaman : 23 - 34*

#### ABSTRAK

Wilayah khusus perbatasan memiliki arti yang sangat strategis terhadap suatu kedaulatan Indonesia. Perbatasan darat memiliki arti yang sama penting dengan perbatasan laut. Masing-masing wilayah perbatasan darat ini mempunyai karakteristik yang spesifik dari segi Pertanahan. Kondisi ini memerlukan perhatian dan penanganan yang juga bersifat khusus dari Pemerintah, termasuk Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Instrumen Pemilikan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penguasaan Tanah (P4T) merupakan dasar bagi Badan Pertanahan Nasional untuk melaksanakan program strategis di wilayah perbatasan darat negara. Upaya selama ini terkendala tata ruang, batas kawasan hutan, dan batas negara yang belum terselesaikan. Persoalan penataan pertanahan di perbatasan memerlukan koordinasi antar lembaga pemerintah supaya tercipta kebijakan yang berdampak problem solving bagi keterbatasan masyarakat lokal. Metode studi kasus tepat untuk menjelaskan problematika di ujung batas negara.

**Kata kunci :** Wilayah perbatasan, Penataan Pertanahan, Koordinasi Antar Lembaga

Indriyati dan Romi Nugroho (Pusat Penelitian dan Pengembangan BPN RI, Jakarta)  
**PENGGUNAAN CONTINUOUSLY OPERATING REFERENCE SYSTEM (CORS) DI BIDANG PERTANAHAN**

*Jurnal Pertanahan, Volume 4, Nomor 2, November 2014, Halaman : 35 - 52*

#### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan pemanfaatan dan penggunaan *Continuously Operating Reference Station* (CORS) khususnya kondisi penggunaan secara teknis dan capaian pengukuran dalam mendukung pelayanan pertanahan. Penggunaan teknis merupakan pelaksanaan dilapangan, baik di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional maupun Kantor Pertanahan sedangkan capaiannya adalah hasil penggunaan dan pemanfaatan alat yang diperoleh selama ini. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menekankan pada penggunaan CORS yang dilihat dari aspek teknis dan capaian penggunaan CORS dalam mendukung pendaftaran tanah. Dari penelitian yang sudah dilaksanakan, diketahui bahwasannya masih ada kantor sampel yang belum menggunakan CORS meskipun sudah mendapatkan alat tersebut, sulit mewajibkan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengukuran untuk menggunakan CORS karena jumlah alat masih terbatas dan terdapat kendala teknis yang dialami petugas saat lapangan, kendala komunikasi data (*rover-base station-server*) dan tidak adanya penganggaran serta rencana pemeliharaan alat. Penggunaan alat untuk legalisasi aset baik sporadik maupun non sporadik dan terdapat korelasi antara latar belakang pendidikan pimpinan terhadap kebijakan penggunaan CORS dan produktivitas penggunaannya.

**Kata kunci :** CORS, Legalisasi Aset, Pertanahan

Muhammad Mauludy (Biro Perencanaan dan Kerjasama BPN RI, Jakarta)  
**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN SERTIPIKASI TANAH DI DAERAH PERKOTAAN**

*Jurnal Pertanahan, Volume 4, Nomor 2, November 2014, Halaman : 53 - 76*

#### ABSTRAK

Manfaat yang ditimbulkan dari keberadaan sertipikat tanah merupakan faktor pendorong masyarakat untuk mensertipikatkan tanahnya. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa sejauhmana penggunaan